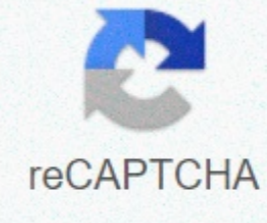




I'm not robot



Continue

Sistem politik amerika serikat pdf

Lihatlah sistem politik Amerika Serikat - Amerika Serikat, yang secara geografis terletak di wilayah Amerika Utara, memiliki representasi demokratis federal, di mana presiden dipilih melalui pemilu yang diikuti rakyat. Pemerintah AS terdiri dari tiga divisi utama, yaitu divisi legislatif, divisi eksekutif, dan divisi Yuridik. Tiga divisi utama bekerja di sepanjang garis arah Kongres Konstitusi Amerika Serikat, Presiden, dan Mahkamah Agung. Sistem pemilihan di Amerika Serikat mencakup pemilihan nasional, pemilihan lokal, dan pemilihan untuk memilih pejabat pemerintah daerah, yang datang bersama-sama dan bekerja sama untuk membuat dan menerapkan undang-undang yang mengatur Amerika Serikat. Pemilu kali ini berfokus pada dua front partai utama di Amerika, yaitu partai Demokrat dan Republik. Seperti halnya di Indonesia, meskipun setiap populasi memilih seseorang sebagai pemimpinnya, kandidat biasanya berafiliasi satu sama lain dalam sebuah partai. Amerika Serikat adalah negara dengan tingkat keragaman yang tinggi, sehingga politisi bersaing untuk posisi melalui fokus program yang berbeda, yang masing-masing merangkul isu-isu dan kepentingan masyarakat umum. Orang-orang yang memiliki minat yang sama dalam suatu masalah biasanya bersatu untuk membentuk organisasi. Organisasi-organisasi inilah yang juga memainkan peran penting dalam proses pemilihan, karena mereka dapat menjadi perwakilan publik. Legislator masa depan juga harus dapat bergabung dengan organisasi-organisasi kerakyatan ini untuk dapat merangkul cita-cita semua komunitas yang terpapar visi misi organisasi. Namun, ini telah menimbulkan pertanyaan opini publik di Amerika Serikat, apakah negara itu benar-benar memiliki prinsip-prinsip demokrasi atau hanya oligarki bagi sekelompok orang dengan kepentingan tertentu. Selain itu, media juga berperan penting dalam politik, yaitu mempengaruhi masyarakat dan bertindak sebagai filter informasi. Secara tradisional, partai politik AS mencari celah untuk mempengaruhi peraturan pemerintah dengan mendaftarkan kandidat yang dipilih oleh partai mereka untuk menduduki kursi politik resmi melalui proses pemilihan. Para pihak harus memaparkan visi dan misi yang jelas dengan publikasi yang mampu menjembanakan kepentingan dan isu yang berbeda di masyarakat. Cara di mana pemilu sedang dilakukan sangat penting untuk menentukan sistem sebuah sistem partai politik. Di negara-negara bagian di Amerika Serikat yang memiliki sedikit pluralisme, biasanya hanya ada dua kandidat kepemimpinan yang dipilih oleh sopan. Kemudian, di negara yang memiliki sistem pemungutan suara proporsional seperti itu di sebagian besar wilayah atau sistem pemungutan suara preferensial seperti Irlandia, tiga partai atau lebih dipilih ke parlemen dalam proporsi tertentu. Proporsi sistem non-partai, tidak ada partai politik resmi yang terlibat, salah satu alasannya adalah karena partai politik resmi memiliki aturan ketat yang mencakup partai politik. Dalam pemilihan non-paritas, setiap kandidat dapat memasuki pemerintahan berdasarkan isu-isu politik yang sedang diperjuangkan. Se jauh menyangkut aturan legislatif dari sistem non-partai, tidak ada hubungan legislatif antara partai politik formal dan lembaga pemerintah. Dalam sistem dua partai seperti yang dianut oleh Jamaika dan Ghana, kedua partai politik bersaing satu sama lain untuk memperluas pengaruh mereka dan mendominasi satu sama lain. Sementara sistem multi-partai adalah sistem yang menempatkan lebih dari dua partai untuk menunjukkan dan terpilih dalam pemilu untuk mengisi kursi pemerintah. Contoh negara yang menerapkan sistem multi-pihak adalah Australia, Kanada, Pakistan, India, Irlandia, Inggris dan Norwegia. Negara-negara ini memiliki dua partai besar yang bekerja dengan pihak ketiga di Amerika Serikat (disingkat Amerika Serikat (AS) dalam bahasa Inggris, sebuah republik federal yang terdiri dari 50 negara bagian yang sebagian besar berlokasi di Amerika.Ci Utara adalah tiga jajaran pemerintah nasional, negara bagian, dan lokal yang memiliki badan legislatif dan eksekutif dengan yurisdiksi masing-masing. Amerika Serikat adalah negara konstitusional demokratis dengan sistem tiga tingkat, dan lembaga peradilan bebasState di Amerika adalah republik federal yang terdiri dari 50 negara bagian (kecuali Alaska & Hawaii), 48 negara bagian lain yang terletak di Amerika Utara. Amerika Serikat menggunakan sistem federalisme di mana negara bagian tengah dan negara bagian berbagi kekuasaan. Gedung Capitoll Hill di Washington DC, Amerika Serikat. washington.org, TEMPO.CO, Jakarta - Demokrat menguasai DPR atau DPR AS dalam pemilu AS 6 November, meskipun Partai Republik masih menguasai Senat AS. Dalam sistem pemerintahan AS, DPR adalah bagian dari Kongres Amerika Serikat. Kongres AS dibagi menjadi dua faksi, yaitu DPR dan Senat.Baca: Amerika Serikat memegang Dpr Pertengahan Pemilu 2018, yang terdiri dari 435 anggota distrik dalam satu negara bagian, mewakili kandidat yang terpilih pada dua tahun di bagian legislatif Kongres AS. DPR akan mengesahkan RUU yang disepakati oleh Senat, yang kemudian dikirim ke presiden untuk disahkan. Pertemuan Kongres AS di Capitol Hill. [washington.org] Sementara Senat yang berjumlah 100 anggota, yang nomor dua untuk setiap negara bagian AS, memilih senator untuk masa jabatan enam tahun untuk membuat hukum federal AS. Baik DPR maupun Senat akan bersama-sama membentuk Kongres. Kongres terdiri dari satu set 435 DPR dan Senat 100, menghasilkan 535 anggota. Mandat Kongres Amerika Serikat adalah untuk anggota DPR dan Senat. DPR lebih besar dan lebih khusus. Ini adalah pintu masuk ke Kongres, kata pakar politik AS Dr Evan Lawrence, dilansir inews.co.uk, 7 November 2018. Orang-orang yang bukan politisi akan pergi ke DPR. Senat jauh lebih profesional. Senat terdiri dari politisi. DPR terpilih setiap dua tahun sekali, sementara Senat terpilih setiap enam tahun, Lawrence menambahkan.Baca: Facebook hapus 115 akun mencurigakan sebelum pemilu AS.mid dilaporkan oleh Express.co.uk, dalam sistem politik AS, administrasi dibagi menjadi tiga cabang presiden dan kabinet (eksekutif) nya, Kongres AS (legislatif), dan pengadilan (yudikatif). Pemisahan kekuatan dirancang untuk menyediakan sistem checks and balances yang mencegah setiap individu atau kelompok mendapatkan terlalu banyak kontrol. Presiden AS Barack Obama, dikelilingi oleh para pemimpin kongres, menandatangani proklamasi peringatan pelantikan, bertajuk Hari Harapan dan Penyelesaian Nasional, di Capitol Hill di Washington, AS, Senin (9/1), setelah upacara pengambilan sumpah untuk Pelantikan Presiden ke-57. AP/Jonathan Ernst, Parlemen Inggris, Kongres AS memutuskan dan membuat undang-undang yang mengatur Amerika Serikat. Kongres juga memiliki kekuatan untuk mendakwa presiden dan menghalangi presiden. Kongres Amerika Serikat terdiri dari majelis tinggi, yang dikenal sebagai Senat, dan majelis rendah yang dikenal sebagai Dewan Perwakilan Rakyat. Kedua majelis didasarkan pada Capitol Hill di Washington DC.Il peran utama senat adalah meloloskan undang-undang yang diusulkan oleh DPR. Setelah disetujui oleh Senat, Presiden mengesahkan undang-undang apa pun, meskipun Kongres dapat meloloskan undang-undang jika ada mayoritas dua pertiga. Masa jabatan Senat adalah enam tahun, tetapi tidak seperti jabatan presiden, tidak ada batas mandat untuk Senat.Baca: Dua wanita Muslim berpartisipasi dalam pemilihan .mid AS untuk pertama kalinya, sementara DPR memiliki 435 anggota, dengan enam perwakilan lain yang tidak terpilih. DPR memiliki wewenang eksklusif untuk menyusun RUU anggaran dan mendakwa pejabat AS yang kemudian diadili di Senat. Amerika Serikat Artikel ini merupakan bagian dari rangkaian: Kongres Pajak Konstitusi Pemerintah Federal Amerika Serikat Presiden Kongres Ketua Senat Lembaga Presiden Partai Pusat Wakil Presiden Kabinet Lembaga Federal

Lembaga Federal Mahkamah Agung Ajukan Banding Pemilihan Presiden Paruh Waku Tahun juga Partai Demokrat Partai Republik Pemerinth Federalisme Pihak Ketiga Parlemen (Register) Pengadilan Negeri Perintah Daerah Negara Lain Portal Perintah AS Atlas melihat Amerika Serikat sebagai republik konstitusional federal, di mana Presiden (kepala negara dan kepala pemerintahan), Kongres, dan lembaga peradilan berbagi kekuasaan yang melekat dalam pemerintahan nasional, dan pemerintah federal berbagi kedaulatan dengan pemerintah negara bagian. Cabang eksekutif dipimpin oleh Presiden dan tidak bergantung pada cabang legislatif. Kekuasaan legislatif terletak di dua rumah Kongres, Senat dan DPR. Cabang yudisial (atau yudisial), yang terdiri dari Mahkamah Agung dan pengadilan federal tingkat bawah, menjalankan kekuasaan yudisial (atau peradilan). Fungsi peradilan adalah untuk menafsirkan konstitusi dan hukum dan peraturan federal yang berlaku di Amerika Serikat. Ini termasuk menyelesaikan perselisihan antara eksekutif dan cabang legislatif. Komposisi dan posisi pemerintah federal dijelaskan dalam konstitusi. Dua partai politik, Partai Demokrat dan Partai Republik, telah mendominasi politik di Amerika sejak Perang Saudara, meskipun ada partai lain juga. Ada dua perbedaan utama antara sistem politik yang dijalankan di Amerika dan sebagian besar demokrasi berkembang lainnya. Ini termasuk kekuatan majelis tinggi yang berkembang di cabang legislatif, ruang lingkup kekuasaan Mahkamah Agung yang lebih luas, pemisahan kekuasaan antara cabang legislatif dan eksekutif, dan dominasi kedua partai politik. Amerika Serikat adalah salah satu negara demokrasi paling maju di dunia, di mana pihak ketiga memiliki sedikit pengaruh politik. Entitas federal yang dibuat oleh Konstitusi AS adalah fitur dominan dari sistem pemerintahan AS. Namun, sebagian besar orang tunduk pada pemerintah negara bagian, dan semuanya tunduk pada berbagai unit pemerintah daerah. Pemerintah daerah yang dimaksud adalah kabupaten (setara kabupaten), kotamadya dan kabupaten khusus. Tumpang tindh yurisdiksi ini mencerminkan sejarah Amerika Serikat. Pemerintah federal diciptakan oleh negara-negara bagian, karena koloni didirikan secara terpisah dan mengatur wilayah masing-masing, secara independen satu sama lain. Unit pemerintah daerah dibuat oleh koloni untuk melakukan fungsi negara tertentu. Ketika negara itu berkembang, pemerintah federal merekomendasikan agar negara-negara baru meniru sistem yang ada. Budaya Politik Kolonial Asal-usul Artikel Utama: Sejarah Kolonial di Amerika Serikat dan Tiga Belas Koloni Budaya politik Amerika berakar pada pengalaman kolonial dan Revolusi Amerika. Tiga belas koloni ini adalah pengecualian di Eropa untuk budaya politik loro mereka, yang menarik anak muda yang ambisius dan berbakat dalam politik. [1] Pertama, hak suara adalah yang paling umum di dunia, di mana siapa pun dengan sejumlah perpropas (tanah dan bangunan) diizinkan untuk menyalurkan suara mereka. Sementara kurang dari 1% orang Inggris dapat memilih, mayoritas orang Amerika kulit putih dianggap memenuhi syarat. Ketika akar demokrasi mulai menjadi jelas, justru rasa disemore dan keanggan ditunjukkan kepada elit sosial dalam pemilihan kolonial. [2] Keanggan dan disaixing ini berkurang secara drastis selama Revolusi Amerika. Kedua, di setiap koloni, sejumlah besar perusahaan publik dan swasta ditentukan oleh badan-badan terpilih, khususnya pemerintah dan majelis kabupaten. [3] Topik-topik yang menarik dan diperdebatkan publik meliputi pembagian tanah, subsidi perdagangan, dan pajak, serta pengawasan jalanan, peduli terhadap masyarakat miskin, kios, dan toko, serta sekolah. Orang Amerika menghabiskan banyak waktu di pengadilan, karena tuntutan hukum perdata menjadi lebih lazim. Urusan hukum diawasi oleh hakim dan hakim setempat, dengan peran sentral dalam pengacara terlatih. Situasi ini memicu pesatnya perkembangan profesi hukum, dan peran dominan pengacara dalam politik terbukti pada 1770-an, seperti yang ditunjukkan oleh karier John Adams dan Thomas Jefferson, di antara banyak lainnya. [4] Ketiga, koloni Amerika adalah pengecualian dalam konteks dunia karena meningkatkan representasi kelompok kepentingan yang berbeda. Tidak seperti di Eropa, di mana pengadilan kerajaan, keluarga bangsawan, dan gereja-gereja lama terkendali, budaya politik Amerika terbuka untuk pedagang, tuan rumah, petani kecil, pengrajin, Anjungan, Presbyterians, Quakers, Jerman, Irlandia, Skotlandia, Yankee, York, dan banyak kelompok tidak dikenal lainnya. Lebih dari 90% perwakilan dipilih untuk dewan legislatif yang menetap di distrik masing-masing, tidak seperti di Inggris, di mana adalah umum untuk memiliki angkota parlemen dan anggota atas senat parlemen. Akhirnya, lebih dramatis, orang Amerika terpesona dan semakin mengadopsi nilai-nilai Republikanisme, yang berfokus pada hak yang sama, kebutuhan warga negara yang baik dan kejahatan korupsi, kemewahan dan kesengsaraan. [5] Tidak ada satu pun koloni yang membentuk partai politik pada tahun 1790, tetapi masing-masing mengelompokkan faksi-faksi yang berloba-loba untuk mendapatkan kekuasaan. Ideologi Republikanisme Amerika, bersama dengan bentuk liberalisme klasik, masih merupakan ideologi yang dominan. Dokumen pusat meliputi Deklarasi Kemerdekaan (1776), Konstitusi (1787), Makalah Federalis (1788), RUU Hak (1791) dan Alamat Gettysburg (1863), dan lainnya. Prinsip dasar ideologi ini meliputi: tugas warga negara: warga negara bertanggung jawab untuk memahami dan mendukung pemerintah, partisipasi dalam pemilu, membayar pajak dan melaksanakan tugas militer (jika negara jadi permintaan). Memerangi korupsi. Demokrasi: Pemerintah mampu memuaskan keinginan warga, yang dapat mengubah waktinya melalui pemilu. Kesamaan di depan hukum: Hukum tidak boleh mengandung perlakuan khusus bagi warga negara. PNS juga dikenakan hukum seperti masyarakat lainnya. Kebebasan beragama: Pemerintah tidak boleh membantu atau menekan agama-agama tertentu. Kebebasan berbicara: pemerintah dilarang membatasi orang (melalui undang-undang/peraturan lain) untuk menyampaikan pendapat tanpa menghasut kekerasan; pasar pemikiran. Pada awal dirikannya Amerika Serikat, ekonomi didasarkan pada pertanian dan usaha swasta kecil, dan pemerintah negara bagian meningkankan masalah kesejahteraan kepada pihak swasta atau inisiatif regional. Seperti di Britania Raya dan perusahaan industri lainnya, ideologi laissez-faire banyak diragukan dalam periode Kelesuan Ekonomi Besar. Antara tahun 1930-an dan 1970-an, kebijakan fiskal ditandai oleh konsensus Keynes, masa ketika liberalisme Amerika modern mendominasi kebijakan ekonomi yang hampir tidak tertandingi. [6] Namun, pada akhir 1970-an dan awal 1980-an, ideologi laissez-faire menjadi kekuatan utama dalam politik Amerika. [8] Sementara negara kesejahteraan Amerika lebih dari tiga kali lipat setelah Perang Dunia II, PDB-nya adalah 20% dari PDB pada 1970-an. [9] Saat ini, liberalisme Amerika modern dan konservatisme Amerika modern terbalik dalam perang politik yang dapat dimakzakan, ditandai dengan apa yang digambarkan oleh para ekonom sebagai perpecahan besar [dan] ditutup, tetapi dengan keras menolak pemilu. [11] Sebelum Perang Dunia II, Amerika Serikat mengadopsi kebijakan luar negeri yang jauh dari upaya untuk campur tangan dengan orang asing, yaitu tidak mengambil bagian dalam perselisihan silang antara kekuatan asing. Amerika Serikat mengabaikan kebijakan ini ketika menjadi negara adidaya, dan negara itu sangat mendukung prinsip internasionalisme. Artikel utama hak suara: Hak suara di Amerika Serikat Hak suara hampir universal bagi warga di atas usia 18 tahun. Seluruh negara bagian dan Washington, D.C. berkontribusi pada pemilihan presiden. Namun, Washington, D.C., dan wilayah AS lainnya yang tidak memiliki status negara, seperti Puerto Rico dan Guam, memiliki sedikit representasi di Kongres. Konstituen ini tidak memiliki hak untuk memilih di luar wilayah masing-masing. Setiap persemakmuran, wilayah, atau mereka hanya bisa memilih wakil yang tidak memiliki hak pilih untuk bertugas di DPR. Hak suara kadang-kadang dilarang karena keyakinan atau kejahatan, tetapi hukum atau peraturan setempat bervariasi tergantung pada kebijakan negara masing-masing. Pemilihan presiden adalah hak suara tidak langsung: pemegang hak suara memilih pemilih, yang pada gilirannya akan memilih presiden. Secara teori, pemilih ini memilih sesuai dengan niat mereka, tetapi dalam praktik modern, mereka biasanya tidak menentang hak pemilih hak suara yang mereka wakili (bahkan jika mereka abstain dari pemungutan suara protes). Pemerintah negara bagian memiliki kekuatan untuk membuat undang-undang tentang semua entitas yang tidak diberikan kepada pemerintah federal atau yang disajikan kepada negara-negara di bawah konstitusi. Kekuatan ini termasuk pendidikan, hukum keluarga, kontrak dan hukum pidana terbanyak. Tidak seperti pemerintah federal, yang hanya memiliki kekuatan-kekuatan di bawah konstitusi, pemerintah negara bagian memiliki kekuatan yang melekat yang memungkinkannya untuk bertindak, kecuali dibatasi oleh konstitusi nasional atau ketentuan negara. Seperti pemerintah federal, pemerintah negara bagian memiliki tiga cabang: eksekutif, legislatif, dan yudikatif. CEO negara bagian ini adalah gubernur rakyat yang dipilih langsung, yang biasanya menjabat untuk masa jabatan empat tahun (meskipun di beberapa negara bagian lain hanya dua tahun). Dengan pengecualian Nebraska, yang memiliki legislatif satu kamar, semua negara bagian memiliki legislatif dua ruang, di mana majelis tinggi biasanya disebut Senat dan majelis rendah disebut DPR, badan musyawarah atau mirip dengan itu. Di sebagian besar negara bagian, senator bekerja untuk masa jabatan empat tahun, dan anggota majelis rendah bekerja untuk masa jabatan dua tahun. Konstitusi negara berbeda dalam beberapa detail, tetapi umumnya mengikuti pola yang sama dengan konstitusi federal, termasuk deklarasi hak-hak warga negara dan rencana konsitusional pemerintah. Namun, konstitusi negara lebih rinci. Artikel utama pemerintah setempat: Kebijakan perkotaan di Amerika Serikat Ada 89.500 pemerintah daerah, mencakup 3.033 kabupaten, 19.492 kotamadya, 16.500 kota kecil, 13.000 distrik sekolah, dan 37.000 distrik lain yang berspesialisasi dalam masalah perlindungan kebakaran. [12] Pemerintah daerah secara langsung melayani kebutuhan masyarakat, menyediakan segala sesuatu mulai dari polisi dan perlindungan kebakaran hingga kode kesehatan, peraturan kesehatan, pendidikan, transportasi umum, dan perumahan. Biasanya pilkada non-partisan, aktivis lokal asosiasi mereka dengan partai politik selama kampanye pemilu dan pemerintah. Sekitar 28% dari populasi tinggal di kota-kota dengan 100.000 atau lebih penduduk. Pemerintah kota memiliki dasar hukum yang ditetapkan negara, dan dasar hukum masing-masing merinci maksud/tujuan dan kuasa pemerintah daerah. Untuk sebagian besar kota besar, organisasi kerja sama federal dan negara bagian sangat penting untuk memenuhi kebutuhan penduduk setempat. Jenis pemerintah kota bervariasi di seluruh negeri. Namun, hampir semua orang memiliki dewan pusat, yang dipilih oleh pemilih suara, dan seorang pejabat eksekutif, dibantu oleh beberapa kepala departemen, untuk mengelola urusan kota. Kota-kota di Barat dan Selatan biasanya memiliki kebijakan regional satu pihak. Ada tiga jenis umum pemerintah kota: walkota, komisi, dan manajer anggota dewan. Ketiganya adalah bentuk murni; banyak kota telah mengembangkan kombinasi dua atau tiga model di atas. Ini adalah bentuk pemerintahan tertua di kota di Amerika Serikat, dan sampai awal abad ke-20, itu digunakan oleh hampir semua kota di Amerika. Strukturnya seperti pemerintah nasional dan pemerintah negara bagian, dengan walkota terpilih sebagai kepala cabang eksekutif dan dewan terpilih mewakili berbagai desa yang membentuk cabang legislatif. Walkota menunjuk kepala departemen kota dan karyawannya lainnya, kadang-kadang membutuhkan persetujuan dewan. Ini memiliki kekuatan veto atas peraturan (hukum kota) dan sering bertanggung jawab untuk menyiapkan anggaran kota. Dewan menyetujui peraturan kota, menetapkan kecukupan dan membagi pendanaan berbagai departemen kota. Ketika kota-kota tumbuh, kursi dewan biasanya mewakili lebih dari satu desa. Ini menggabungkan fungsi legislatif dan eksekutif menjadi sekelompok staf, biasanya hingga tiga orang atau lebih, yang dipilih oleh penduduk kota. Setiap anggota komisi mengawasi dan mengawasi pekerjaan di satu atau lebih departemen kota. Salah satunya disebut presiden badan dan biasanya disebut walkota, meskipun kekuasaannya setara dengan anggota komisi lainnya. Dewan Manajemen Kota adalah respons terhadap semakin kompleksnya masalah perkotaan yang membutuhkan keterampilan yang jarang mereka kelola dibagikan oleh pelayan publik terpilih. Tanggapan ini meyakinkan sebagian besar pejabat eksekutif, termasuk pemberdayaan hukum dan ketentuan layanan, kepada manajer kota yang terlatih, berpengalaman, dan profesional. Rencana pengelola kota telah dilaksanakan oleh beberapa kota. Di bawah rencana, dewan kecil yang dipilih membuat peraturan kota dan menentukan kebijakan, tetapi rekrutmen juga telah membayar staf administrasi. city manager, untuk mengeluarkan keputusan. Manajer menjelaskan anggaran kota dan mengawasi / mengendalikan sebagian besar departemen. Biasanya, tidak ada istilah yang ditetapkan; manajer bekerja sampai dewan puas dengan pekerjaannya. Pemerintah kabupaten atau setara dengan sebuah kabupaten adalah pembagian wilayah AS di bawah negara bagian, kadang-kadang (tidak selalu) berisi dua atau lebih kota kecil dan beberapa desa. Kota New York sangat luas sehingga dibagi menjadi lima daerah perkotaan (wilayah), masing-masing setara dengan kabupaten dengan hak bebas. Di sisi lain, Arlington County, Virginia, kabupaten terkecil di Amerika Serikat, terletak di seberang Sungai Potomac dari Washington, D.C., baik daerah perkotaan maupun pinggiran kota, yang diatur oleh administrasi kabupaten terpadu. Di kota-kota lain, pemerintah kota dan kabupaten telah digabungkan, dengan hasil dari pemerintah kota-kabupaten yang terintegrasi. Di sebagian besar kabupaten di Amerika Serikat, sebuah kota kecil dirangkap sebagai ibukota kabupaten, dan di sinilah kantor pemerintah berada, dan anggota komisi atau dewan pengawas mengadakan pertemuan bersama. Di kabupaten yang lebih kecil, anggota dewan dipilih oleh kabupaten, di kabupaten yang lebih besar, pengawas mewakili distrik atau kota kecil yang terpisah. Komite dewan memungut pajak untuk pemerintah negara bagian dan daerah, pinjaman dan penyediaan dana; menyiapkan gaji pegawai kabupaten; mengawasi pemilu; konstruksi dan pemeliharaan jalan tol dan jembatan; dan mengurus program kesejahteraan yang dikembangkan oleh pemerintah nasional, negara bagian dan provinsi. Di kabupaten yang sangat kecil, kekuasaan eksekutif dan legislatif dapat sepenuhnya dari satu anggota komisi, dibantu oleh lembaga yang mengawasi dan mengatur perpajakan dan pemilihan. Di beberapa negara bagian baru di Inggris, kabupaten tidak memiliki fungsi pemerintahan, melainkan hanya pembagi tanah. Pemerintah kota-kota kecil dan desa-desa Ribun yurisdiksi terlalu kecil untuk dinyatakan sebagai pemerintah kota. Yurisdiksi ini direimkan sebagai kota kecil atau desa dan menangani kebutuhan lokal, seperti pengaspalan dan penerangan jalan, memastikan pasokan air bersih, menyediakan layanan perlindungan kebakaran dan polisi dan pengelolaan limbah. Di banyak Negara Bagian Amerika Serikat, istilah kota tidak memiliki arti khusus; dengan pengecualian istilah informal yang diterapkan ke tempat-tempat berpenduduk (umum atau umum tidak berbanduk hukum dapat dimasukkan). Selain itu, di beberapa negara bagian, istilah kota setara dengan kota sipil yang digunakan di negara bagian lain. Pemerintah ini biasanya dipercayakan kepada badan atau dewan terpilih, yang dapat diidentifikasikan dengan nama yang berbeda: dewan desa atau kota, badan terpilih, badan pengawas, badan komisi. Badan ini mungkin memiliki presiden atau presiden yang menjabat sebagai CEO-nya, atau bahkan mungkin memiliki walkota terpilih. Pegawai pemerintah dapat dipekerjakan, bendahara, polisi, pemadam kebakaran dan pejabat kesehatan dan kesehatan masyarakat. Aspek unik pemerintah daerah, yang terutama terletak di daerah New England, Amerika Serikat, adalah pertemuan kota. Setahun sekali, atau lebih sering jika perlu, pemilih terdaftar di kota kecil berkumpul dalam sesi terbuka untuk memilih pejabat pemerintah, membahas masalah lokal, dan menyepakati peraturan daerah untuk menjalankan pemerintahan. Sebagai agensi, mereka menentukan pembangunan dan perbaikan/pemeliharaan jalan, pembangunan gedung dan struktur publik, besaran pajak dan anggaran kota kecil. Dewan kota kecil, yang telah diberlakukan selama lebih dari tiga abad di beberapa tempat, sering dianggap sebagai bentuk demokrasi langsung yang paling orisinal, di mana kekuasaan pemerintah tidak didelegasikan, tetapi dilaksanakan secara langsung dan berkala oleh semua orang di wilayah yang bersangkutan. Artikel utama keuangan kampanye: Keuangan kampanye di Amerika Serikat Partisipasi yang baik, terutama dalam pemilihan federal, membutuhkan sejumlah besar pendanaan, terutama untuk iklan televisi. [14] Dana itu sangat sulit diperoleh hanya melalui basis massa langsung,[15] meskipun dalam pemilihan umum 2008, kedua kandidat Partai Demokrat dan Republik melakukannya dengan baik dengan perolehan dana kota di Internet.[16] seperti yang dilakukan Howard Dean dengan daya tarik internetnya yang besar. Kedua belah pihak biasanya mengandalkan organisasi atau donatur kaya - Demokrat biasanya mengandalkan sumbangan dari pekerja yang dilembagakan, sementara Partai Republik mengandalkan sumbangan majikan. Namun, sejak 1984 kontribusi pengusaha untuk Partai Demokrat telah melampaui kontribusi dari serikat pekerja. Ketergantungan terhadap donor ini cukup kontroversial dan mengarah pada implementasi undang-undang yang membatasi pengeluaran untuk kampanye politik (lihat reformasi keuangan kampanye di Amerika Serikat). Mereka yang menolak undang-undang keuangan kampanye mengacu pada Amandemen Pertama konstitusi yang menjamin kebebasan berbicara dan menentang undang-undang keuangan kampanye ketika mereka berusaha untuk memotong hak-hak orang yang telah dijamin konstitusi. Bahkan ketika undang-undang telah diberlakukan, kompleksitas penyesuaian dengan Pertama, konstitusi membutuhkan pembahasan RUU yang cermat dan cermat untuk menghasilkan undang-undang yang memiliki ruang lingkup yang agak terbatas, terutama jika dibandingkan dengan negara lain, seperti Inggris, Prancis atau Kanada. Partai politik dan pemilu konstitusi AS tidak pernah secara resmi membahas urusan partai politik, terutama karena para pendiri negara asal tidak mendefinisikan politik Amerika sebagai partai. Dalam Federalist Papers #9 dan #10, Alexander Hamilton dan James Madison, masing-masing, menulis secara khusus tentang bahaya faksi politik nasional. Dan sekali lagi, presiden pertama Amerika Serikat, George Washington, bukan anggota partai politik mana pun pada saat pemilihannya atau selama waktunya sebagai presiden. Pihaknya juga berharap partai politik tidak perlu, takut konflik dan kebenaran politik. Namun, awal sistem dua partai di Amerika mulai muncul dari lingkaran dalam penasihatnya, termasuk Hamilton dan Madison. Dalam pemilihan partai, kandidat dihadirkan oleh partai politik atau mencari jabatan publik sebagai peserta independen. Setiap negara bagian memiliki kebijakan penting dalam hal menentukan bagaimana kandidat disajikan, dan karenanya memenuhi persyaratan untuk muncul di kertas suara. Biasanya, kandidat dari partai-partai utama secara resmi ditentukan pada pertemuan kongres atau primer partai yang bersangkutan, sementara kandidat dari partai yang lebih kecil atau independen harus menyelesaikan proses aplikasi. Partai politik Lihat juga: Partai politik di Amerika Serikat sistem partai politik modern di Amerika Serikat adalah sistem dua partai yang didominasi oleh Demokrat dan Republik. Kedua belah pihak telah memenangkan semua pemilihan presiden AS sejak 1852 dan telah mengendalikan Kongres AS sejak setidaknya 1856. Beberapa pertiga dari waktu ke waktu mereka menerima representasi yang relatif sedikit di tingkat nasional dan negara bagian. Di antara kedua partai utama, Partai Demokrat umumnya telah memosisikan dirinya sebagai sayap kiri dalam politik Amerika dan telah mendukung prinsip liberalisme Amerika, sementara Partai Republik umumnya memosisikan dirinya sebagai sayap kanan dan mendukung prinsip konservatisme Amerika. Pemilu Lihat juga: Pemilu AS Tidak seperti Inggris dan sistem parlemen lainnya, rakyat AS menyalurkan suara mereka terhadap kandidat tertentu, untuk tidak memilih partai politik tertentu. Di bawah pemerintah federal, karyawan dipilih di negara bagian federal, negara bagian, dan lokal. Secara nasional, presiden, secara tidak langsung dipilih oleh rakyat, melalui Lembaga Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Amerika Serikat. Inggris. zaman modern, anggota lembaga selalu menyalurkan suaranya sesuai dengan suara rakyat di masing-masing negara bagian. Semua anggota Kongres, dan kantor di negara bagian dan negara bagian setempat dipilih secara langsung. Hukum federal dan negara bagian keduanya mengatur pelaksanaan pemilu. Konstitusi AS mendefinisikan (sampai ekspansi mendasar) bagaimana pemilihan federal dilakukan, dalam Pasal Satu dan Pasal Dua dan berbagai amandemen. Hukum negara mengatur sebagian besar aspek hukum pemilihan, termasuk primari, kelayakan pemilik suara (di luar definisi konstitusional dasar), jalannya pemilihan presiden di setiap negara bagian, dan jalannya pemilihan di negara bagian setempat. Organisasi partai politik Lihat juga: Organisasi partai politik di Amerika Serikat Partai politik di Amerika Serikat diselenggarakan lebih bebas daripada negara lain. Kedua partai utama, khususnya, tidak memiliki organisasi formal di negara bagian yang mengendalikan keanggotaan, kegiatan atau posisi politik, meskipun ada beberapa negara terafiliasi yang melakukannya. Jadi, bagi seorang Amerika untuk mengatakan dia anggota Partai Demokrat atau Partai Republik, dia sangat berbeda dari orang Inggris yang mengatakan dia anggota Partai Buruh atau Partai Konservatif. Di Amerika Serikat, seseorang dapat menjadi anggota partai, hanya dengan mengatakan demikian. Di beberapa negara bagian, pemilih hak suara dapat mendaftar sebagai anggota partai dan/atau memilih dalam pemilihan utama untuk partai tersebut atau pihak lain. Partisipasi seperti itu sama sekali tidak membatasi pilihan seseorang. Juga tidak memberikan hak atau karyawan tertentu kepada seseorang dari partai, selain dengan mengizinkan orang itu untuk memberikan suaranya dalam pemilihan utama partai. Anda dapat memilih untuk menghindari pertemuan komite partai lokal suatu hari, dan menghindari komite partai lain kemarin. Satu-satunya faktor yang mendekati seseorang dengan tindakan tersebut adalah kuantitas dan kualitas partisipasi dalam kegiatan partai dan kemampuannya untuk mendorong orang lain untuk menunjukkan rasa tanggung jawab. Identifikasi partai menjadi sesuatu yang lebih formal ketika seseorang secara aktif maju berdamangan dengan salah satu pihak. Di sebagian besar negara bagian, ini berarti menyatakan diri Anda sebagai kandidat untuk partai tertentu dan bermaksud untuk mengambil bagian dalam pemilihan utama partai yang bersangkutan untuk mengambil jabatan tertentu. Komite partai dapat memilih untuk memilih seseorang yang mencari nominasi, tetapi pada akhirnya opsi diserahkan kepada orang yang memilih untuk memberikan suaranya dalam pemilihan utama, dan kadang-kadang sulit untuk mengatakan siapa yang akan mengambil bagian dalam pemungutan suara. Hasilnya adalah bahwa partai politik di Amerika memiliki organisasi pusat yang lemah dan ideologi sentral kecil, kecuali melalui permukaan. Sebuah partai tidak dapat mencegah seseorang untuk tidak menyetujui mayoritas posisi partai atau secara aktif bekerja melawan kesediaan partai untuk menyatakan keanggotaan partai, asalkan pemilihan yang memilih untuk memberikan suara mereka dalam pemilihan primer memilih orang tersebut. Setelah menjabat, pejabat terpilih dapat mengubah partai hanya dengan menyatakan niat itu. Di tingkat federal, masing-masing dari dua partai utama memiliki komisi nasional (lihat Komisi Nasional Demokrat dan Komisi Nasional Republik) yang berfungsi sebagai pusat penggalangan dana dan kegiatan kampanye, terutama dalam kampanye pemilihan presiden. Komposisi yang tepat dari komite-komite ini berbeda antara Demokrat dan Republik, tetapi mereka terdiri dari perwakilan partai-partai negara bagian dan organisasi yang berafiliasi dengan mereka, dan pihak mana pun yang penting bagi partai yang bersangkutan. Namun, komisi nasional tidak memiliki kekuatan untuk mengarahkan atau mengatur kegiatan anggota partai. Kedua belah pihak juga memiliki komite kampanye terpisah yang bekerja untuk memilih kandidat di beberapa tingkatan. Yang paling signifikan dari keduanya adalah Komite Bukit, yang bertugas memilih kandidat untuk setiap ruang kongres. Bagian negara berada di semua negara bagian, meskipun strukturnya bervariasi untuk mematuhi hukum negara masing-masing, serta aturan partai di tingkat nasional dan negara bagian. Meskipun organisasi-organisasi ini lemah, pemilu masih digambarkan sebagai perlombaan nasional antara partai politik. Dalam apa yang dikenal sebagai efek jubah, calon presiden menjadi pemimpin de facto untuk masing-masing partai mereka, dan karena itu biasanya mendukung pendukung yang pada gilirannya akan memilih kandidat partainya untuk masuk ke pemerintahan. Di sisi lain, pemilihan federal (yang hanya untuk pemilihan anggota Kongres, dan bukan untuk pemilihan presiden) biasanya dipandang sebagai referendum (jajak pendapat) tentang kiprah presiden yang melayani, di mana pemilih memilih atau tidak melawan presiden terlepas dari asal-usul partai, yang pada gilirannya membantu sesi Kongres berikutnya lulus atau menolak agenda presiden. [18] Perkembangan umum Lihat juga: Sejarah Partai Republik Amerika Serikat dan Sejarah Partai Demokrat Amerika Serikat Ada banyak Pendiri Amerika Serikat yang membengkokkan pemikiran partai politik. [20] Saya yang saling bertarung yang lebih tertarik untuk bersaing satu sama lain daripada bekerja demi kebaikan bersama. Mereka ingin orang-orang memilih kandidat tanpa campur tangan dari kelompok yang terorganisir, tetapi itu tidak terjadi. Pada tahun 1790-an, sudut pandang baru dan berbeda tentang arah sosial negara dikembangkan, dan mereka yang menentang dengan cara ini mencoba untuk mendapatkan dukungan dari gerakan mereka dengan melakukan hal yang sama. Para pengikut Alexander Hamilton, faksi Hamilton, mengambil nama federalis; mereka menginginkan pemerintah pusat yang kuat yang akan mendukung kepentingan komersial dan industri. Pengikut Thomas Jefferson, Jeffersonians, dan kemudian anti-federalis, mengambil nama Demokrat-Republik; mereka lebih suka republik agraria terdesentralisasi di mana pemerintah federal memiliki kekuasaan terbatas. Pada tahun 1828, Federalis menghilang sebagai organisasi, digantikan oleh Partai Whig, yang hadir sebagai oposisi terhadap pemilihan selama masa Presiden Andrew Jackson. Kepresidenan Jackson membagi Partai Demokrat-Republik: Pengikut Jackson menjadi Demokrat dan mereka yang mengikuti kepemimpinan John Quincy Adams menjadi Partai Republik nasional. Sistem dua partai yang masih dipertahankan saat ini lahir saat ini. (Catatan: Partai Republik nasional John Quincy Adams tidak sama dengan Partai Republik saat ini). Pada tahun 1850, pertanyaan tentang perubahan berakhir; Partai Whig mengangguk isu itu dan tenggelam dalam kematiannya setelah kekalahan pemilu Franklin Pierce yang menakutkan dalam pemilihan presiden 1852. Mantan anggota Partai Whig bergabung dengan Gerakan Know Nothing atau Republik yang baru. Sementara Partai Know Nothing tidak bertahan lama, Partai Republik mampu menahan tekanan politik yang kuat dalam menjelang Perang Saudara. Kebijakan utama Partai Republik adalah bahwa perubahan harus dihapuskan dari semua bidang negara. Enam tahun kemudian, partai baru memenangkan kepresidenan ketika Abraham Lincoln memenangkan pemilihan presiden pada tahun 1860. Setelah itu, partai-partai dapat berdiri kokoh sebagai organisasi politik dominan di negara ini, dan kesetiaan kepada partai telah menjadi bagian penting dari politik kesadaran publik. Kesetiaan kepada partai diturunkan dari ayah ke anak, dan kegiatan pesta, termasuk acara kampanye yang luar biasa, dengan kelompok pawai berseragam dan parade obor, menjadi bagian dari kehidupan sosial berbagai komunitas. Namun, pada 1920-an peristiwa populis ruih ini berkurang. Reformasi kota, pelayanan publik, undang-undang korupsi, dan lembaga utama pemilihan presiden yang menggantikan kekuatan politisi di konvensi nasional telah membantu dunia politik menjadi lebih bersih. Pengembangan sistem dua pihak di Amerika Serikat Lihat juga: Penyebab sistem dua pihak Sejak 1790, negara ini telah dijalankan oleh dua partai besar. Ada banyak partai politik kecil atau partai politik tingkat ketiga yang hadir dari waktu ke waktu. Mereka cenderung berfungsi untuk mendukung kebijakan yang benar-benar diadopsi oleh dua partai politik utama. Pada berbagai waktu Partai Sosialis, Partai Buruh Tani, dan Partai Populus memiliki kekuatan lokal yang signifikan selama beberapa tahun, dan kemudian lenyap, meskipun di negara bagian Minnesota, Partai Buruh-Petani bergabung ke Partai Demokrat Minnesota setempat, sekarang secara resmi dikenal sebagai Partai Buruh-Petani-Demokrat Minnesota. Saat ini, Partai Libertarian adalah partai ketiga yang paling sukses. Negara Bagian New York memiliki sejumlah pihak ketiga lainnya, yang kadang-kadang mengajukan kandidat mereka untuk menjabat dan kadang-kadang termasuk kandidat dari dua partai utama. Di Distrik Columbia, Distrik Partai Negara Bagian Columbia telah menjabat sebagai partai ketiga yang kuat di sepanjang Demokrat dan Republik. Sebagian besar anggota dewan di Amerika Serikat dipilih oleh distrik satu pihak dan memasuki tenggat waktu penugasan dengan mengalahkan lawan mereka dalam sistem untuk menentukan pemenang dari apa yang disebut first-past-it-post (yang pertama memenuhi syarat, dia adalah orang yang bertanggung jawab); partai yang memenangkan mayoritas, (yang tidak sama dengan menang dengan suara mayoritas). Ini mempromosikan sistem dua bagian; Lihat aturan Duverger. Ketika distrik kongres dengan banyak kursi tidak dilaksanakan, representasi proporsional tidak mungkin dan pihak ketiga tidak dapat berkembang. Meskipun pemilihan umum kepada Senat memilih dua senator untuk setiap konstitusin (negara), persyaratan sebenarnya dilaksanakan yang hasilnya adalah konstituensi kursi tunggal untuk pemilihan Senat. Faktor kritis lainnya adalah aturan akses pemungutan suara (aturan yang menentukan partai politik atau individu yang muncul di kertas suara sebagai peserta pemilu). Awalnya, pemilih adalah 94:00 dan mengumumkan kandidat mana yang mereka dukung. Kemudian, ini berevolusi menjadi proses di mana masing-masing partai politik akan membuat kertas suara sendiri dan kemudian pemilih meletakkan kertas suara partai dalam jaguk pendapat. Pada akhir abad ke-19, negara-negara bagian mulai menerapkan Metode Pemungutan Suara Rahasia Australia, dan menjadi standar nasional. Metode pemungutan suara rahasia bahwa kerahasiaan pemilih hak suara akan dilindungi (yang oleh karena itu tugas pemerintah tidak lagi diperuntukkan bagi pemilih suara setia) dan setiap negara bertanggung jawab atas pembelian surat suara resmi. Fakta bahwa legislatif negara didominasi oleh Demokrat dan Republik membuat pemberi partai-partai ini kesempatan untuk mengesahkan undang-undang yang mendiskriminasi partai politik yang lebih kecil, hukum yang sangat tidak pandang bulu sehingga tidak umum sampai Ketakutan Merah pertama melanda Amerika setelah Perang Dunia I. Perlu juga dicatat bahwa sebagian besar waktu, anggota partai akan mematuhi dan mendukung kebijakan partai mereka, bebas untuk melawan partai mereka sendiri dan menyalurkan suara mereka ke oposisi (silang) ketika mereka menginginkan mereka. Di Amerika Serikat, label politik yang sama (Demokrat dan Republik) mencakup hampir semua pemegang jabatan publik, dan oleh karena itu sebagian besar pemilih di seluruh dunia tergerak atas nama kedua belah pihak, kata Nelson W. Polsby, seorang profesor ilmu politik, dalam buku New Federalist Papers: Essays in Defense of the Constitution. Bahkan, Demokrat dan Partai Republik di seluruh dunia tidak sama. Variasi (kadang-kadang hampir tidak terlewatkan, kadang-kadang jelas jelas) dalam 50 budaya politik negara membuat perbedaan yang signifikan di semua lini pemahaman, atau cara untuk memilih, Demokrat atau Republik. Perbedaan-perbedaan ini memberikan kesan bahwa seseorang dapat dibenarkan dalam merujuk pada sistem dua pihak Amerika, seolah-olah itu lebih dari seratus sistem partai. Spektrum politik kedua partai utama abad ke-20, seluruh filosof politik baik Partai Republik maupun Partai Demokrat, mengalami perubahan dramatis dari filosofi mereka sebelumnya. Dari 1860 hingga 1950, Partai Republik dianggap liberal secara klasik, sementara Demokrat dianggap populis / konservatif secara klasik. Ini mengubah perjanjian dengan pembentukan presiden Demokrat Franklin D. Roosevelt, di mana Kesepakatan Baru termasuk pembentukan Jaminan Sosial, serta berbagai layanan federal dan proyek pekerjaan umum lainnya. Penampilan Roosevelt dalam dua krisis tetangga, Kelesuan Besar dan Perang Dunia II menyebabkan semacam iji politik nasional, berpusat di sekitarnya: yang akhirnya bermain dengan kebijakan liberalnya yang mengarahkan partai untuk kiri, kiri, sementara Partai Republik cenderung kanan-kanan. Selama tahun 1950-an dan awal 1960-an, kedua belah pihak menunjukkan pendekatan politik yang mengantungi di tengah-tengah ke pangung nasional, dan masing-masing memiliki sayap pengaruh yang liberal, moderat, dan konservatif. Sejak 1960-an, sayap konservatif menjadi lebih dominan di dalam partai Republik, dan sayap liberal menjadi lebih dominan di dalam Partai Demokrat. Pemilihan presiden AS 1964 mengembang-bombarkan kebangkitan sayap konservatif di pihak Republik. Sayap liberal dan sayap konservatif di dalam Partai Demokrat bersaing satu sama lain sampai 1972, ketika pencalonan George McGovern menandai kemenangan sayap liberal. Ini juga terjadi di dalam Partai Republik dengan pencalonannya yang menyebabkan kemenangan Ronald Reagan pada tahun 1980, yang menandai kemenangan sayap konservatif. Dalam pemilihan presiden AS 1980, kedua partai besar menjadi semakin dikenal oleh orientasi politik mereka yang dominan. Pertunjukkan kekuatan pada 1990-an oleh reformis independen Ross Perot mendorong partai-partai besar untuk menghindari kandidat presiden yang lebih berorientasi pada pusat, seperti Bill Clinton dan Bob Dole. Pemilih di Kongres, menurut beberapa orang, direkatkan kembali setelah pengambilalihan Partai Republik pada tahun 1994. Yang lain mengatakan pemungutan suara muncul pada akhir 1980-an, ketika Demokrat menguasai semua kamar Kongres. Kaum liberal di dalam Partai Republik dan konservatif di dalam Partai Demokrat dan Dewan Kepemimpinan Demokrat neoliberal telah memainkan peran yang diuji maverick politik (independen), pusat radikal, atau agen real estat dari kompromi antara kedua partai utama. Mereka juga telah membantu untuk mendapatkan dukungan dari partai masing-masing di daerah-daerah tertentu yang mungkin tidak digunakan untuk memilih anggota partai itu; Partai Republik telah menggunakan pendekatan ini dengan jalan tengah Republik sebagai Rudy Giuliani, George Pataki, Richard Riordan dan Arnold Schwarzenegger. Pemilihan presiden AS 2006 mengirimi banyak Demokrat kanan tengah atau konservatif ke legislatif negara bagian dan federal, termasuk beberapa perubahan komposisi kontrol parlemen di beberapa negara bagian, yang paling terkenal adalah Kansas dan Montana. Kelompok tekanan politik Lihat juga: Kelompok kepentingan Beberapa kelompok kepentingan memberikan pengaruh atau topik kepada konstituen mereka. Organisasi bisnis akan mendukung pajak perusahaan yang rendah dan pembatasan hak untuk bereaksi, sementara serikat pekerja akan mendukung undang-undang upah minimum dan perlindungan tawar-menawar Grup minat pribadi seperti gereja dan kelompok suku, lebih memperhatikan masalah kebijakan yang lebih luas yang dapat mempengaruhi organisasi atau kepercayaan mereka. Salah satu jenis kelompok kepentingan swasta yang telah tumbuh dalam jumlah dan pengaruh dalam beberapa tahun terakhir adalah Komisi Aksi Politik atau PAC. Semua ini adalah kelompok independen, yang diselenggarakan di sekitar satu masalah atau berbagai masalah, yang menyumbangkan dana dalam kampanye politik ke kursi kongres atau pada Presiden Amerika Serikat. PAC terbalas dalam hal jumlah yang dapat mereka sumbangkan langsung kepada kandidat dalam pemilihan federal. Namun, untuk CAP tidak ada batasan dalam hal jumlah yang dapat dijamu secara mandiri untuk mendukung sudut pandang atau untuk meminta pemilihan calon jabatan. Jumlah PAC saat ini mencapai ribuan. Jumlah kelompok kepentingan meningkat, semakin mereka mengandalkan kegiatan mereka di Washington, D.C., dan mewakili diri mereka sendiri langsung di hadapan Kongres dan lembaga federal, michael Schudson mengatakan dalam bukunya tahun 1998 The Good Citizen: A History of American Civic Life. Ada banyak organisasi yang mengawasi Washington untuk mencari dukungan moral dan material dari orang awasi. Karena banyak dari mereka fokus pada serangkaian kekawatiran yang sempit atau bahkan satu masalah, dan seringkali sangat emosional sangat terombang, mereka bersaing dengan pihak-pihak untuk dolar, waktu dan semangat warga. Jumlah uang yang dihabiskan oleh kepentingan khusus ini tumbuh, seperti kampanye untuk menjadi lebih mahal. Ada banyak orang Amerika yang percaya bahwa kepentingan kaya ini, apakah perusahaan, federal atau PAC, sangat kuat sehingga orang-orang biasa dapat melakukan sedikit untuk mengurangi pengaruh mereka. Sebuah survei terhadap anggota Asosiasi Ekonomi Amerika menemukan mayoritas besar, terlepas dari hubungan politik, yang tidak puas dengan keadaan demokrasi Amerika saat ini. Perhatian utama adalah prevalensi dan pengaruh kelompok kepentingan khususnya dalam proses politik, yang cenderung mengarah pada konsekuensi politik yang hanya akan menguntungkan politisi dan kelompok kepentingan khusus. Beberapa tuduhan yang memicu kebijakan status quo dan keraguan itu memperthalkan lingkungan politik yang gagal meningkatkan kesejahteraan rakyat. [21] Reformasi Lihat juga: Reformasi Kesehatan di Amerika Serikat Lihat juga pemerintah federal hukum pemilihan AS mengacu pada gerakan Partai Teh AS - Patricia U. Bonomi, A Factious People: Politics and Society in Colonial New York (Columbia U.P., 1971) p 281 - Richard R. Beeman, The pertahanan di Amerika Abad Kedelapan Belas, Studi Amerika Awal: Jurnal Interdisipliner, Volume 3 -2 Muzim Gugur 2005, hal. 311-340 - Patricia U. Bonomi, A Factious People: Politics and Society in Colonial New York (Columbia U.P., 1971) hal. 281:2 - Anton-Hermann Chroust, Kebangkitan Profesi Hukum di Amerika (2 jilid 1965), vol 1. Bonomi, Orang Yang Faktual, pp 281-286 - Minggu, J. (2007). Tren ketimpangan di beberapa negara OECD yang dikembangkan. Dalam J. K. S. ∓ J. Baudot (Eds.) Dunia datar, kesenangan besar: liberalisasi ekonomi, globalisasi, kemiskinan dan ketimpangan (159-176). Buku-buku oleh zed. Thomas, E. (10 Maret 2008). Dia tahu dia benar. Newsweek. Bebas bulan 2008-04-19. Clark, B. (1998). Ekonomi politik: pendekatan komparatif. Westport, CT: Praeger. Alber, J. (1988). Apakah ada krisis dalam keadaan kesejahteraan? Tes nasional dari Eropa, Amerika Utara dan Jepang. Tinjauan Sosiologis Eropa, 4(3), 181-207. Barr, N. (2004). Ekonomi negara kesejahteraan. New York: Oxford University Press (USA). Ekonom Unit Intelejen. (11 Juli 2007). Amerika Serikat: Kekuatan Politik. The Economist. Bebas bulan 2008-06-03. - Abstrak statistik. 2010 hal. 416./ Ann O'm. Bowman dan Richard C. Kearney, pemerintah negara bagian dan lokal: The Essentials (2008) hal. 78 - - -//www.america.gov/st/usg-english/2008/July/20080710130812mlenuhreg0.6269953.html alamat perpishan Washington - Baker, Peter; VandeHei, Jim (2006—21—2008). Sebuah teguran dari pemilih untuk Bush, perang dan kanan. Bebas bulan 2010-05-26. Bush dan penasihat senior Karl Rove mencoba meniru strategi itu minus gugur ini, berharap untuk menargetkan agar pemilihan tidak menjadi referendum pada kepemimpinan presiden. Faktor Pemilu '98 Lewinsky tidak pernah terwujud. Cnn. 1998-11-04. Amerika menghindari kesempatan untuk mengubah pemilihan tengah semester Selasa menjelang referendum tentang perilaku Presiden Bill Clinton, gagah harapan Partai Republik untuk mendapatkan kursi di DPR dan Senat. - Davis, William L., dan Bob Figgins (2009). Apakah para ekonom percaya bahwa demokrasi Amerika bekerja? Econ Journal Watch (62): 195-202. Econwatch.org Pustaka lanjutan Barone, Michael dkk. Halaman Almanac of American Politics, 2010 (2009) 1920 mencakup setiap anggota Kongres dan gubernur secara mendalam. Edwards, George C., Martin P. Wattenberg dan Robert L. Lineberry. Pemerintah di Amerika: People, Politics, and Policy (edisi ke-14, 2009) Finkelman, Paul dan Peter Wallenstein, ed. Ensiklopedia Sejarah Politik Amerika (2001), esai pendek oleh para sarjana Jack P., ed. Ensiklopedia Sejarah Politik Amerika: Studi gerakan dan gagasan utama (3 vols. 1984), esai panjang oleh cendekiawan Hershey, Marjorie R. Party Politics di Amerika (edisi ke-14, 2010) Hetherington, Marc J., dan Bruce A. Larson. Partii, politica e politica publica di Amerika (edisi kesebelas, 2009). 301 pp Kazin, Michael, Rebecca Edwards dan Adam Rothman, ed. Princeton Encyclopedia dari Sejarah Politik Amerika (2 jilid 2009) Maisel, L. Sandy, ed. Partai politik dan pemilu di Amerika Serikat: Encyclopedia 2 vol (Garland, 1991). (ISBN 0-8240-7975-2), esai pendek karya cendekiawan Maisel, L. Sandy. Partai politik dan pemilu Amerika: pengantar singkat (2007), 144 pp O'Connor, Karen, Larry J. Sabato dan Alexandra B. Yanus. Pemerintah AS: Akar dan Reformasi (11 Ed. 2011) Wilson, James Q., dan John J. Diulio dan Meena Bose. Pemerintah AS: Institusi dan Kebijakan (12 ed. 2010) Pranala luar Wikimedia Commons memiliki media mengenai Politik AS. Politik Amerika Serikat karya Curlie (dari DMO) Situs web resmi partai politik Partai Demokrat Partai Republik Partai Hijau Partai Libertarian Diperoleh dari

^[1] Lemba

ga Federal Mahkamah Agung Aju

kan Band

ing Pem

ilihan Presiden Paruh Waku

Tahun juga Part

ai Dem

okrat Part

ai Rep

ublik P

emerint

h Federalisme P

ihak K

etiga Par

lem

en (Register) Pengad

ilan N

egeri P

erint

ah Daerah Negara Lain Portal P

erint

ah AS Atlas melihat Amerika Serikat sebagai republik konstitusional federal, di mana Presiden (kepala negara dan kepala pemerintahan), Kongres, dan lembaga peradilan berbagi kekuasaan yang melekat dalam pemerintahan nasional, dan pemerintah federal berbagi kedaulatan dengan pemerintah negara bagian. Cabang eksekutif dipimpin oleh Presiden dan tidak bergantung pada cabang legislatif. Kekuasaan legislatif terletak di dua rumah Kongres, Senat dan DPR. Cabang yudisial (atau yudisial), yang terdiri dari Mahkamah Agung dan pengadilan federal tingkat bawah, menjalankan kekuasaan yudisial (atau peradilan). Fungsi peradilan adalah untuk menafsirkan konstitusi dan hukum dan peraturan federal yang berlaku di Amerika Serikat. Ini termasuk menyelesaikan perselisihan antara eksekutif dan cabang legislatif. Komposisi dan posisi pemerintah federal dijelaskan dalam konstitusi. Dua partai politik, Partai Demokrat dan Partai Republik, telah mendominasi politik di Amerika sejak Perang Saudara, meskipun ada partai lain juga. Ada dua perbedaan utama antara sistem politik yang dijalankan di Amerika dan sebagian besar demokrasi berkembang lainnya. Ini termasuk kekuatan majelis tinggi yang berkembang di cabang legislatif, ruang lingkup kekuasaan Mahkamah Agung yang lebih luas, pemisahan kekuasaan antara cabang legislatif dan eksekutif, dan dominasi kedua partai politik. Amerika Serikat adalah salah satu negara demokrasi paling maju di dunia, di mana pihak ketiga memiliki sedikit pengaruh politik. Entitas federal yang dibuat oleh Konstitusi AS adalah fitur dominan dari sistem pemerintahan AS. Namun, sebagian besar orang tunduk pada pemerintah negara bagian, dan semuanya tunduk pada berbagai unit pemerintah daerah. Pemerintah daerah yang dimaksud adalah kabupaten (setara kabupaten), kotamadya dan kabupaten khusus. Tumpang tindh yurisdiksi ini mencerminkan sejarah Amerika Serikat. Pemerintah federal diciptakan oleh negara-negara bagian, karena koloni didirikan secara terpisah dan mengatur wilayah masing-masing, secara independen satu sama lain. Unit pemerintah daerah dibuat oleh koloni untuk melakukan fungsi negara tertentu. Ketika negara itu berkembang, pemerintah federal merekomendasikan agar negara-negara baru meniru sistem yang ada. Budaya Politik Kolonial Asal-usul Artikel Utama: Sejarah Kolonial di Amerika Serikat dan Tiga Belas Koloni Budaya politik Amerika berakar pada pengalaman kolonial dan Revolusi Amerika. Tiga belas koloni ini adalah pengecualian di Eropa untuk budaya politik loro mereka, yang menarik anak muda yang ambisius dan berbakat dalam politik. [1] Pertama, hak suara adalah yang paling umum di dunia, di mana siapa pun dengan sejumlah perpropas (tanah dan bangunan) diizinkan untuk menyalurkan suara mereka. Sementara kurang dari 1% orang Inggris dapat memilih, mayoritas orang Amerika kulit putih dianggap memenuhi syarat. Ketika akar demokrasi mulai menjadi jelas, justru rasa disemore dan keanggan ditunjukkan kepada elit sosial dalam pemilihan kolonial. [2] Keanggan dan disaixing ini berkurang secara drastis selama Revolusi Amerika. Kedua, di setiap koloni, sejumlah besar perusahaan publik dan swasta ditentukan oleh badan-badan terpilih, khususnya pemerintah dan majelis kabupaten. [3] Topik-topik yang menarik dan diperdebatkan publik meliputi pembagian tanah, subsidi perdagangan, dan pajak, serta pengawasan jalanan, peduli terhadap masyarakat miskin, kios, dan toko, serta sekolah. Orang Amerika menghabiskan banyak waktu di pengadilan, karena tuntutan hukum perdata menjadi lebih lazim. Urusan hukum diawasi oleh hakim dan hakim setempat, dengan peran sentral dalam pengacara terlatih. Situasi ini memicu pesatnya perkembangan profesi hukum, dan peran dominan pengacara dalam politik terbukti pada 1770-an, seperti yang ditunjukkan oleh karier John Adams dan Thomas Jefferson, di antara banyak lainnya. [4] Ketiga, koloni Amerika adalah pengecualian dalam konteks dunia karena meningkatkan representasi kelompok kepentingan yang berbeda. Tidak seperti di Eropa, di mana pengadilan kerajaan, keluarga bangsawan, dan gereja-gereja lama terkendali, budaya politik Amerika terbuka untuk pedagang, tuan rumah, petani kecil, pengrajin, Anjungan, Presbyterians, Quakers, Jerman, Irlandia, Skotlandia, Yankee, York, dan banyak kelompok tidak dikenal lainnya. Lebih dari 90% perwakilan dipilih untuk dewan legislatif yang menetap di distrik masing-masing, tidak seperti di Inggris, di mana adalah umum untuk memiliki angkota parlemen dan anggota atas senat parlemen. Akhirnya, lebih dramatis, orang Amerika terpesona dan semakin mengadopsi nilai-nilai Republikanisme, yang berfokus pada hak yang sama, kebutuhan warga negara yang baik dan kejahatan korupsi, kemewahan dan kesengsaraan. [5] Tidak ada satu pun koloni yang membentuk partai politik pada tahun 1790, tetapi masing-masing mengelompokkan faksi-faksi yang berloba-loba untuk mendapatkan kekuasaan. Ideologi Republikanisme Amerika, bersama dengan bentuk liberalisme klasik, masih merupakan ideologi yang dominan. Dokumen pusat meliputi Deklarasi Kemerdekaan (1776), Konstitusi (1787), Makalah Federalis (1788), RUU Hak (1791) dan Alamat Gettysburg (1863), dan lainnya. Prinsip dasar ideologi ini meliputi: tugas warga negara: warga negara bertanggung jawab untuk memahami dan mendukung pemerintah, partisipasi dalam pemilu, membayar pajak dan melaksanakan tugas militer (jika negara jadi permintaan). Memerangi korupsi. Demokrasi: Pemerintah mampu memuaskan keinginan warga, yang dapat mengubah waktinya melalui pemilu. Kesamaan di depan hukum: Hukum tidak boleh mengandung perlakuan khusus bagi warga negara. PNS juga dikenakan hukum seperti masyarakat lainnya. Kebebasan beragama: Pemerintah tidak boleh membantu atau menekan agama-agama tertentu. Kebebasan berbicara: pemerintah dilarang membatasi orang (melalui undang-undang/peraturan lain) untuk menyampaika

n pendapat tanpa menghasut

n kekerasan; pasar pemikiran. Pada awal

n dir

ikannya Amerika Serikat, ekonomi didasarkan pada pertanian dan usaha swasta kecil, dan pemerintah negara bagian m

eningkankan masalah kesejahteraan kepada pihak swasta atau inisiatif regional. Seperti di Britania Raya dan perusahaan industri lainnya, ideologi laissez-faire banyak diragukan dalam periode Kelesuan Ekonomi Besar. Antara tahun 1930-an dan 1970-an, kebijakan fiskal ditandai oleh konsensus Keynes, masa ketika liberalisme Amerika modern mendominasi kebijakan ekonomi yang hampir tidak tertandingi. [6] Namun, pada akhir 1970-an dan awal 1980-an, ideologi laissez-faire menjadi kekuatan utama dalam politik Amerika. [8] Sementara negara kesejahteraan Amerika lebih dari tiga kali lipat setelah Perang Dunia II, PDB-nya adalah 20% dari PDB pada 1970-an. [9] Saat ini, liberalisme Amerika modern dan konservatisme Amerika modern terbalik dalam perang politik yang dapat dimakzakan, ditandai dengan apa yang digambarkan oleh para ekonom sebagai perpecahan besar [dan] ditutup, tetapi dengan keras menolak pemilu. [11] Sebelum Perang Dunia II, Amerika Serikat mengadopsi kebijakan luar negeri yang jauh dari upaya untuk campur tangan dengan orang asing, yaitu tidak mengambil bagian dalam perselisihan silang antara kekuatan asing. Amerika Serikat mengabaikan kebijakan ini ketika menjadi negara adidaya, dan negara itu sangat mendukung prinsip internasionalisme. Artikel utama hak suara: Hak suara di Amerika Serikat Hak suara hampir universal bagi warga di atas usia 18 tahun. Seluruh negara bagian dan Washington, D.C. berkontribusi pada pemilihan presiden. Namun, Washington, D.C., dan wilayah AS lainnya yang tidak memiliki status negara, seperti Puerto Rico dan Guam, memiliki sedikit representasi di Kongres. Konstituen ini tidak memiliki hak untuk memilih di luar wilayah masing-masing. Setiap persemakmuran, wilayah, atau mereka hanya bisa memilih wakil yang tidak memiliki hak pilih untuk bertugas di DPR. Hak suara kadang-kadang dilarang karena keyakinan atau kejahatan, tetapi hukum atau peraturan setempat bervariasi tergantung pada kebijakan negara masing-masing. Pemilihan presiden adalah hak suara tidak langsung: pemegang hak suara memilih pemilih, yang pada gilirannya akan memilih presiden. Secara teori, pemilih ini memilih sesuai dengan niat mereka, tetapi dalam praktik modern, mereka biasanya tidak menentang hak pemilih hak suara yang mereka wakili (bahkan jika mereka abstain dari pemungutan suara protes). Pemerintah negara bagian memiliki kekuatan untuk membuat undang-undang tentang semua entitas yang tidak diberikan kepada pemerintah federal atau yang disajikan kepada negara-negara di bawah konstitusi. Kekuatan ini termasuk pendidikan, hukum keluarga, kontrak dan hukum pidana terbanyak. Tidak seperti pemerintah federal, yang hanya memiliki kekuatan-kekuatan di bawah konstitusi, pemerintah negara bagian memiliki kekuatan yang melekat yang memungkinkannya untuk bertindak, kecuali dibatasi oleh konstitusi nasional atau ketentuan negara. Seperti pemerintah federal, pemerintah negara bagian memiliki tiga cabang: eksekutif, legislatif, dan yudikatif. CEO negara bagian ini adalah gubernur rakyat yang dipilih langsung, yang biasanya menjabat untuk masa jabatan empat tahun (meskipun di beberapa negara bagian lain hanya dua tahun). Dengan pengecualian Nebraska, yang memiliki legislatif satu kamar, semua negara bagian memiliki legislatif dua ruang, di mana majelis tinggi biasanya disebut Senat dan majelis rendah disebut DPR, badan musyawarah atau mirip dengan itu. Di sebagian besar negara bagian, senator bekerja untuk masa jabatan empat tahun, dan anggota majelis rendah bekerja untuk masa jabatan dua tahun. Konstitusi negara berbeda dalam beberapa detail, tetapi umumnya mengikuti pola yang sama dengan konstitusi federal, termasuk deklarasi hak-hak warga negara dan rencana konsitusional pemerintah. Namun, konstitusi negara lebih rinci. Artikel utama pemerintah setempat: Kebijakan perkotaan di Amerika Serikat Ada 89.500 pemerintah daerah, mencakup 3.033 kabupaten, 19.492 kotamadya, 16.500 kota kecil, 13.000 distrik sekolah, dan 37.000 distrik lain yang berspesialisasi dalam masalah perlindungan kebakaran. [12] Pemerintah daerah secara langsung melayani kebutuhan masyarakat, menyediakan segala sesuatu mulai dari polisi dan perlindungan kebakaran hingga kode kesehatan, peraturan kesehatan, pendidikan, transportasi umum, dan perumahan. Biasanya pilkada non-partisan, aktivis lokal asosiasi mereka dengan partai politik selama kampanye pemilu dan pemerintah. Sekitar 28% dari populasi tinggal di kota-kota dengan 100.000 atau lebih penduduk. Pemerintah kota memiliki dasar hukum yang ditetapkan negara, dan dasar hukum masing-masing merinci maksud/tujuan dan kuasa pemerintah daerah. Untuk sebagian besar kota besar, organisasi kerja sama federal dan negara bagian sangat penting untuk memenuhi kebutuhan penduduk setempat. Jenis pemerintah kota bervariasi di seluruh negeri. Namun, hampir semua orang memiliki dewan pusat, yang dipilih oleh pemilih suara, dan seorang pejabat eksekutif, dibantu oleh beberapa kepala departemen, untuk mengelola urusan kota. Kota-kota di Barat dan Selatan biasanya memiliki kebijakan regional satu pihak. Ada tiga jenis umum pemerintah kota: walkota, komisi, dan manajer anggota dewan. Ketiganya adalah bentuk murni; banyak kota telah mengembangkan kombinasi dua atau tiga model di atas. Ini adalah bentuk pemerintahan tertua di kota di Amerika Serikat, dan sampai awal abad ke-20, itu digunakan oleh hampir semua kota di Amerika. Strukturnya seperti pemerintah nasional dan pemerintah negara bagian, dengan walkota terpilih sebagai kepala cabang eksekutif dan dewan terpilih mewakili berbagai desa yang membentuk cabang legislatif. Walkota menunjuk kepala departemen kota dan karyawannya lainnya, kadang-kadang membutuhkan persetujuan dewan. Ini memiliki kekuatan veto atas peraturan (hukum kota) dan sering bertanggung jawab untuk menyiapkan anggaran kota. Dewan menyetujui peraturan kota, menetapkan kecukupan dan membagi pendanaan berbagai departemen kota. Ketika kota-kota tumbuh, kursi dewan biasanya mewakili lebih dari satu desa. Ini menggabungkan fungsi legislatif dan eksekutif menjadi sekelompok staf, biasanya hingga tiga orang atau lebih, yang dipilih oleh penduduk kota. Setiap anggota komisi mengawasi dan mengawasi pekerjaan di satu atau lebih departemen kota. Salah satunya disebut presiden badan dan biasanya disebut walkota, meskipun kekuasaannya setara dengan anggota komisi lainnya. Dewan Manajemen Kota adalah respons terhadap semakin kompleksnya masalah perkotaan yang membutuhkan keterampilan yang jarang mereka kelola dibagikan oleh pelayan publik terpilih. Tanggapan ini meyakinkan sebagian besar pejabat eksekutif, termasuk pemberdayaan hukum dan ketentuan layanan, kepada manajer kota yang terlatih, berpengalaman, dan profesional. Rencana pengelola kota telah dilaksanakan oleh beberapa kota. Di bawah rencana, dewan kecil yang dipilih membuat peraturan kota dan menentukan kebijakan, tetapi rekrutmen juga telah membayar staf administrasi. city manager, untuk mengeluarkan keputusan. Manajer menjelaskan anggaran kota dan mengawasi / mengendalikan sebagian besar departemen. Biasanya, tidak ada istilah yang ditetapkan; manajer bekerja sampai dewan puas dengan pekerjaannya. Pemerintah kabupaten atau setara dengan sebuah kabupaten adalah pembagian wilayah AS di bawah negara bagian, kadang-kadang (tidak selalu) berisi dua atau lebih kota kecil dan beberapa desa. Kota New York sangat luas sehingga dibagi menjadi lima daerah perkotaan (wilayah), masing-masing setara dengan kabupaten dengan hak bebas. Di sisi lain, Arlington County, Virginia, kabupaten terkecil di Amerika Serikat, terletak di seberang Sungai Potomac dari Washington, D.C., baik daerah perkotaan maupun pinggiran kota, yang diatur oleh administrasi kabupaten terpadu. Di kota-kota lain, pemerintah kota dan kabupaten telah digabungkan, dengan hasil dari pemerintah kota-kabupaten yang terintegrasi. Di sebagian besar kabupaten di Amerika Serikat, sebuah kota kecil dirangkap sebagai ibukota kabupaten, dan di sinilah kantor pemerintah berada, dan anggota komisi atau dewan pengawas mengadakan pertemuan bersama. Di kabupaten yang lebih kecil, anggota dewan dipilih oleh kabupaten, di kabupaten yang lebih besar, pengawas mewakili distrik atau kota kecil yang terpisah. Komite dewan memungut pajak untuk pemerintah negara bagian dan daerah, pinjaman dan penyediaan dana; menyiapkan gaji pegawai kabupaten; mengawasi pemilu; konstruksi dan pemeliharaan jalan tol dan jembatan; dan mengurus program kesejahteraan yang dikembangkan oleh pemerintah nasional, negara bagian dan provinsi. Di kabupaten yang sangat kecil, kekuasaan eksekutif dan legislatif dapat sepenuhnya dari satu anggota komisi, dibantu oleh lembaga yang mengawasi dan mengatur perpajakan dan pemilihan. Di beberapa negara bagian baru di Inggris, kabupaten tidak memiliki fungsi pemerintahan, melainkan hanya pembagi tanah. Pemerintah kota-kota kecil dan desa-desa Ribun yurisdiksi terlalu kecil untuk dinyatakan sebagai pemerintah kota. Yurisdiksi ini direimkan sebagai kota kecil atau desa dan menangani kebutuhan lokal, seperti pengaspalan dan penerangan jalan, memastikan pasokan air bersih, menyediakan layanan perlindungan kebakaran dan polisi dan pengelolaan limbah. Di banyak Negara Bagian Amerika Serikat, istilah kota tidak memiliki arti khusus; dengan pengecualian istilah informal yang diterapkan ke tempat-tempat berpenduduk (umum atau umum tidak berbanduk hukum dapat dimasukkan). Selain itu, di beberapa negara bagian, istilah kota setara dengan kota sipil yang digunakan di negara bagian lain. Pemerintah ini biasanya dipercayakan kepada badan atau dewan terpilih, yang dapat diidentifikasikan dengan nama yang berbeda: dewan desa atau kota, badan terpilih, badan pengawas, badan komisi. Badan ini mungkin memiliki presiden atau presiden yang menjabat sebagai CEO-nya, atau bahkan mungkin memiliki walkota terpilih. Pegawai pemerintah dapat dipekerjakan, bendahara, polisi, pemadam kebakaran dan pejabat kesehatan dan kesehatan masyarakat. Aspek unik pemerintah daerah, yang terutama terletak di daerah New England, Amerika Serikat, adalah pertemuan kota. Setahun sekali, atau lebih sering jika perlu, pemilih terdaftar di kota kecil berkumpul dalam sesi terbuka untuk memilih pejabat pemerintah, membahas masalah lokal, dan menyepakati peraturan daerah untuk menjalankan pemerintahan. Sebagai agensi, mereka menentukan pembangunan dan perbaikan/pemeliharaan jalan, pembangunan gedung dan struktur publik, besaran pajak dan anggaran kota kecil. Dewan kota kecil, yang telah diberlakukan selama lebih dari tiga abad di beberapa tempat, sering dianggap sebagai bentuk demokrasi langsung yang paling orisinal, di mana kekuasaan pemerintah tidak didelegasikan, tetapi dilaksanakan secara langsung dan berkala oleh semua orang di wilayah yang bersangkutan. Artikel utama keuangan kampanye: Keuangan kampanye di Amerika Serikat Partisipasi yang baik, terutama dalam pemilihan federal, membutuhkan sejumlah besar pendanaan, terutama untuk iklan televisi. [14] Dana itu sangat sulit diperoleh hanya melalui basis massa langsung,[15] meskipun dalam pemilihan umum 2008, kedua kandidat Partai Demokrat dan Republik melakukannya dengan baik dengan perolehan dana kota di Internet.[16] seperti yang dilakukan Howard Dean dengan daya tarik internetnya yang besar. Kedua belah pihak biasanya mengandalkan organisasi atau donatur kaya - Demokrat biasanya mengandalkan sumbangan dari pekerja yang dilembagakan, sementara Partai Republik mengandalkan sumbangan majikan. Namun, sejak 1984 kontribusi pengusaha untuk Partai Demokrat telah melampaui kontribusi dari serikat pekerja. Ketergantungan terhadap donor ini cukup kontroversial dan mengarah pada implementasi undang-undang yang membatasi pengeluaran untuk kampanye politik (lihat reformasi keuangan kampanye di Amerika Serikat). Mereka yang menolak undang-undang keuangan kampanye mengacu pada Amandemen Pertama konstitusi yang menjamin kebebasan berbicara dan menentang undang-undang keuangan kampanye ketika mereka berusaha untuk memotong hak-hak orang yang telah dijamin konstitusi. Bahkan ketika undang-undang telah diberlakukan, kompleksitas penyesuaian dengan Pertama, konstitusi membutuhkan pembahasan RUU yang cermat